



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANITIA KERJA DESA WISATA DAN KAMPUNG TEMATIK
KOMISI X DPR RI
KE DESA WISATA RAMMANG-RAMMANG
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
17 S.D 19 SEPTEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, pada awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan adanya wabah *Covid-19* yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Pandemi *Covid-19* di Indonesia, tidak hanya membawa dampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga turut melumpuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata yang semula diproyeksikan akan menjadi *core economy* dan penyumbang devisa terbesar, justru menjadi salah satu sektor yang paling terpukul. Dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini, pengembangan desa wisata maupun kampung tematik, menjadi sangat penting.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Panitia Kerja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI bermaksud melakukan Kunjungan Kerja Panja untuk pengembangan pariwisata ke Desa Wisata di Kabupaten Maros, untuk melihat secara langsung perkembangan sekaligus melakukan pengawasan dalam rangka mengkaji kebijakan pemerintah, khususnya dalam infrastruktur, promosi hingga kemungkinan bencana alam terhadap Desa Wisata.

A. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
6. Undang-Undang Nomor No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 18 Agustus 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 oleh Komisi X DPR-RI adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah Maros terkait

perkembangan kebijakan Pemerintah, khususnya dalam hal infrastruktur desa wisata, promosi desa wisata, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

C. Metode Kunjungan Kerja

Metode kerja yang digunakan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Maros di antaranya yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Maros yang dihadiri:
 - a. DPRD Kabupaten Maros.
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Maros.
 - c. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros.
 - d. Pengelola Desa Wisata Rammang-rammang;
 - e. Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kabupaten Maros .
 - f. Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata
 - g. Organisasi/lembaga bidang pariwisata di Kabupaten Maros, antara lain:
 - Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI),
 - Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA),
 - Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI),
 - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI),
 - Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO),
 - Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI),
 - Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI),
 - Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI),
 - Hotel *Human Resources Managers Association* (HHRMA),
 - Himpunan Penulis Pariwisata (HPP),
 - Generasi Pesona Indonesia (GenPI),
 - Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia (HMPI).
2. Tinjauan lapangan destinasi Desa Wisata Rammang-rammang.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Maros tanggal 17 s.d 19 September 2021 (jadwal terlampir).

E. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Desa Wisata Rammang-Rammang Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dipimpin oleh Ferdiansyah, S.E., M.M. (A-300/F.PG) selaku Ketua Tim dengan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, yaitu: Henky Hotma Parlindungan Manurung (Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis) dan Wawan Gunawan (Direktur Pengembangan Destinasi II).

II. ISI LAPORAN

A. Data, Informasi, dan Temuan

1. Desa Wisata Rammang-Rammang sendiri terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki pemandangan alam yang sangat eksotis.
2. Rammang-Rammang merupakan sebuah tempat di gugusan pegunungan karst terbesar ketiga di dunia dengan luas sekitar 43.700 hektar dan memiliki 280 gua. sebanyak 16 gua di antaranya menjadi situs prasejarah.
3. Rammang-Rammang merupakan bagian dari Geopark Maros-Pangkep dan telah menjadi salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Maros.
4. Di tahun 2019 jumlah pengunjung Rammang-Rammang mencapai lebih dari 50 ribu wisatawan dan memberikan dampak cukup besar bagi perekonomian masyarakat yang menawarkan jasa sewa perahu, *tour guide*, makanan, dan lainnya.
5. Atraksi wisata pedesaan di Kabupaten Maros sangat beragam, Unik dan memiliki kekhasan masing-masing. Atraksi tersebar didaerah pesisir/pantai, dataran rendah, kawasan Kars/Bukit kapur sampai ke daerah pegunungan.
6. Daya tarik wisata di desa wisata memiliki karakter yang kuat dengan reputasi internasional antara lain daya tarik wisata yang terletak di Kawasan Kars dengan status geo site Geopark Maros Pangkep yang tahun ini dinominasikan oleh pemerintah pusat menjadi Unesco Global Geopark bersama Geopark Kawah Ijen di Banyuwangi.
7. Aksesibilitas menuju daya tarik wisata sudah terkoneksi dan terkonsolidasi dengan baik melalui program pembangunan jalan beton sepanjang 100 Km setiap tahun sejak tahun 2012. Program ini sangat strategis dalam menghubungkan setiap daya tarik wisata yang tersebar diseluruh pelosok pedesaan. Selain akses yang sudah memadai semua daya tarik wisata sangat mudah dijangkau semua moda transportasi darat.
8. Kondisi Amenitas untuk beberapa Desa Wisata secara umum belum tersedia disemua desa wisata terutama untuk layanan komunikasi jaringan telepon dan internet belum menjangkau secara luas terutama di daerah pegunungan.
9. Strategi pengembangan desa wisata di Kab.Maros untuk infrastruktur antara lain adalah peningkatan kualitas jalan dalam mendukung pemantapan aksesibilitas yang sudah baik dengan melakukan pengaspalan/Hotmix terhadap jaringan jalan beton yang telah dibangun. Selain itu perlu dibangun sarana fasilitas umum antara lain areal parkir, Jalur pedestrian, sarana ibadah, toilet standar dan area penjualan produk UMKM bagi pelaku usaha jasa pariwisata pada setiap desa wisata yang ada. Untuk penyiapan SDM, pemerintah daerah telah melakukan beberapa program kegiatan berupa sosialisasi, pelatihan dan workshop pengelolaan desa wisata serta pelatihan bersifat teknis lainnya antara lain; pelatihan pemandu wisata, pelatihan inovasi kuliner, pelatihan branding kemasan produk UMKM dan pelatihan keamanan dan keselamatan di kawasan wisata. Untuk sinkronisasi program lintas sektor dalam upaya percepatan pengembangan desa wisata,

pemerintah daerah telah merancang peraturan terkait kolaborasi dan kerjasama pembangunan dan pengelolaan desa wisata dengan para pihak berkepentingan dengan mengedepankan prinsip kolaboratif, pembangunan kepariwisataan yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.

10. Terkait kebutuhan biaya untuk pengembangan desa wisata di kabupaten maros itu sangat tergantung dari kondisi eksisting masing-masing desa wisata, tapi secara umum perkiraan biaya untuk setiap Desa Wisata adalah dikisaran dua sampai lima milyar rupiah. Asumsi pendapatan yang bisa diraup setiap tahun dikisaran enam milyar sampai sepuluh milyar per tahun.
11. Untuk mitigasi bencana, pemerintah daerah telah melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi bencana pada setiap daya tarik wisata dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset yang tentunya dapat digunakan untuk merumuskan arah kebijakan khususnya pengembangan desa wisata.
12. Peranan sektor swasta dalam mendukung pengembangan desa wisata di Kabupaten Maros sangat baik yang ditandai dengan pengalokasian dana CSR perusahaan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dasar, pemberian bantuan modal usaha dan kegiatan peningkatan kompetensi pelaku usaha jasa wisata khususnya pengelola desa wisata dengan mensupport kegiatan pelatihan, sosialisasi dan workshop bagi pengelola desa wisata.
13. Peran serta masyarakat/swasta belum optimal, beberapa desa wisata masih pada kategori perintis sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi/penyuluhan serta koordinasi untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta untuk secara bersama membangun dan mengembangkan desa wisata.
14. Dampak atas keberadaan desa wisata di kabupaten Maros tentu sangat positif dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Maros dan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kreatif dan UMKM. Beberapa desa wisata telah memperlihatkan tanda-tanda keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pemerintah desa dalam membangun desa wisata.
15. Pemerintah daerah telah melakukan kerjasama/MoU dengan lembaga, institusi pendidikan antara lain dengan Poltekpar Makassar, Universitas Negeri Makassar, Unifa, UNHAS, Stipar Makassar untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan dan workshop bagi pelaku/pengelola desa wisata.
16. Penyiapan lahan dan perijinan mutlak diperlukan karena dapat mendorong kepastian investasi bagi pihak swasta dan penganggarn dari pemerintah pusat dalam membangun sarana dan prasarana pariwisata di desa wisata
17. Nomenklatur kementerian pariwisata sudah sangat tepat dengan adanya ekonomi kreatif sebagai bagian yang menjadi kewenangan Kemenpar karena sektor tersebut merupakan urusan yang berkaitan langsung dengan kegiatan wisata, dimana ketika sebuah daerah menjadi

destinasi pariwisata mutlak diperlukan ketersediaan produk ekonomi kreatif.

B. Permasalahan dan Temuan

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pariwisata, dan mencatat beberapa temuan sebagai berikut:

1. Konsep pengembangan desa wisata lebih kepada bagaimana masyarakat terlibat aktif mulai perencanaan, pengembangan sampai ke pengelolaan sehingga upaya pemahaman dan peningkatan wawasan masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan wisata adalah tantangan yang paling besar, untuk itu maka perlu dilakukan upaya pendekatan kepada masyarakat terkait arti penting sektor wisata dalam mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kemampuan teknis dan manajerial untuk secara bersama para pihak untuk pengembangan desa wisata.
2. Belum optimalnya koordinasi, kemitraan, kerja sama dan kolaborasi yang diakibatkan belum adanya peraturan yang dapat mengatur tatakelola dan mekanisme penganggaran dengan skema kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak swasta.
3. Pemerintah pusat perlu mendorong program kegiatan melalui fasilitasi dan memberikan bantuan pendanaan untuk kegiatan pendampingan kepada kelompok sadar wisata yang menjadi pelaku/pengelola desa wisata
4. Dalam perkembangannya, kawasan wisata karst Rammang-Rammang mulai diminati wisatawan asing, akan tetapi kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pemandu wisata yang bertugas khusus memandu dan menginformasikan nilai-nilai sejarah yang ada di kawasan wisata Karst Rammang-Rammang. Saat ini hanya masyarakat lokal pengemudi perahu yang berupaya menceritakan sejarah singkat tentang objek wisata kars Rammang-Rammang dengan keterbatasan bahasa, hal inilah yang menjadi kendala bagi wisatawan asing.
5. Terbatasnya anggaran yang tersedia terkait pengembangan wisata karst Rammang-Rammang.
6. Perancangan media promosi belum maksimal, menjadikan belum dikenalnya desa wisata Rammang-rammang secara luas.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik di Kabupaten Maros, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pariwisata, diantaranya Bupati Kabupaten Maros, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Pengelola Geopark Rammang-Rammang, Direktur Politeknik Pariwisata Makasar, dan pengelola desa wisata di Kabupaten Maros. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemenparekraf RI, antara lain:

1. Tim Kunjungan Spesifik Panja Desa Wisata Komisi X DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Maros khususnya di Desa Rammang-Rammang yang telah memaksimalkan potensi kekayaan alam desa menjadi destinasi wisata yang menarik. Kawasan wisata Rammang-Rammang sudah banyak dikunjungi wisatawan luar negeri yang tertarik dengan pariwisata Karst maupun para peneliti sejarah. Namun promosi wisata kawasan Rammang-rammang yang sedang diusulkan ke UNESCO menjadi kawasan geopark tersebut dirasakan masih sangat kurang masif.
2. Dalam hal pengembangan kawasan wisata desa di Kabupaten Maros, Tim Kunjungan Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah disekitar Maros agar terjalin promosi bersama yang saling mendukung, dan pemerintah daerah diharapkan memiliki prosedur dan aturan yang jelas mengenai mekanisme penentuan desa wisata dan kampung tematik.
3. Sementara itu, perwakilan dari Kemenparekraf/Baparekraf RI, Henky Hotma Parilindungan Manurung (Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis) menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat sangat serius untuk mendukung industri pariwisata di kabupaten maros, bahkan beberapa bulan sebelumnya Menteri Parekraf berkunjung ke destinasi pariwisata di Kabupaten Maros untuk mensupport secara langsung upaya pemulihan pariwisata dan mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan di destinasi wisata yang ada di kawasan Rammang-rammang. Terkait promosi pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, Kemenparekraf akan mengupayakan penyelenggaraan bimbingan teknis bagi para pelaku pariwisata yang bekerjasama dengan Politeknik Pariwisata Makassar.

III. KESIMPULAN

1. Kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah berpengaruh demi pengembangan destinasi wisata Karst Rammang-Rammang. Ini dikarenakan diantara keduanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Dimana masyarakat setempat sebagai pengelola membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak pemerintah untuk menunjang proses pengembangan destinasi wisata.
2. Kemitraan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah. Untuk itu, upaya pengembangan pola-pola kemitraan dan kerja sama yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan kepariwisataan daerah akan terus dikembangkan dan di tingkatkan.

IV. REKOMENDASI

Tim kunjungan kerja spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Desa Wisata Rammang-Rammang kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan sebagai berikut:

1. Komisi X DPR RI mendukung penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) parekraf, destinasi yang bagus harus didukung dengan sumber daya manusia pelakunya. Perlunya Kemenparekraf RI memfasilitas pelatihan bagi pelaku pariwisata di desa wisata Rammang-Rammang, dan pelaku ekonomi kreatif di sekitar kawasan destinasi wisata desa.
2. Komisi X mendesak Kemenparekraf RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar melakukan perbaikan infrastruktur pariwisata di kawasan Rammang-Rammang.
3. Komisi X mendukung untuk memperkenalkan lebih luas destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros terutama destinasi wisata Karst Rammang-Rammang yang lokasinya berada di Desa Salenrang, dalam hal ini media promosi harus lebih ditingkatkan lagi agar wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara akan lebih tertarik sehingga akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung.

V. PENUTUP

Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan, dan masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah laporan tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik ke Desa wisata Rammang-Rammang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan pada masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ini, agar data dijadikan bahan masukan dan memperoleh tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 19 September 2021

Ketua Tim

Ferdiansyah, S.E., M.M.
A-300